



**BUPATI KOTABARU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KOTABARU**  
**NOMOR 162 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH ADMINISTRASI**  
**DESA BAKAU DENGAN DESA BEPARA**  
**KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Bakau dengan Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/225/63.02.13.2006/VII/2022 dan Nomor 146.3/020/63.02.13.2002/VII/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Bakau dengan Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BAKAU DENGAN DESA BEPARA KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel, kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas Wilayah Administrasi Desa Bakau dengan Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Bakau dengan Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Bakau dengan Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 04 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 23' 47.833''$  LS dan  $116^{\circ} 12' 8.035''$  BT (titik koordinat berada pada garis batas Kecamatan/Delineasi tahun 2018) dan;
2. Dari titik 04 menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 28' 27.319''$  LS dan  $116^{\circ} 9' 40.503''$  BT (Titik Koordinat mengikuti hasil Deliniasi batas Tahun 2018).

Pasal 3

Posisi TK sebagai dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 4 Oktober 2022

Bupati Kotabaru,



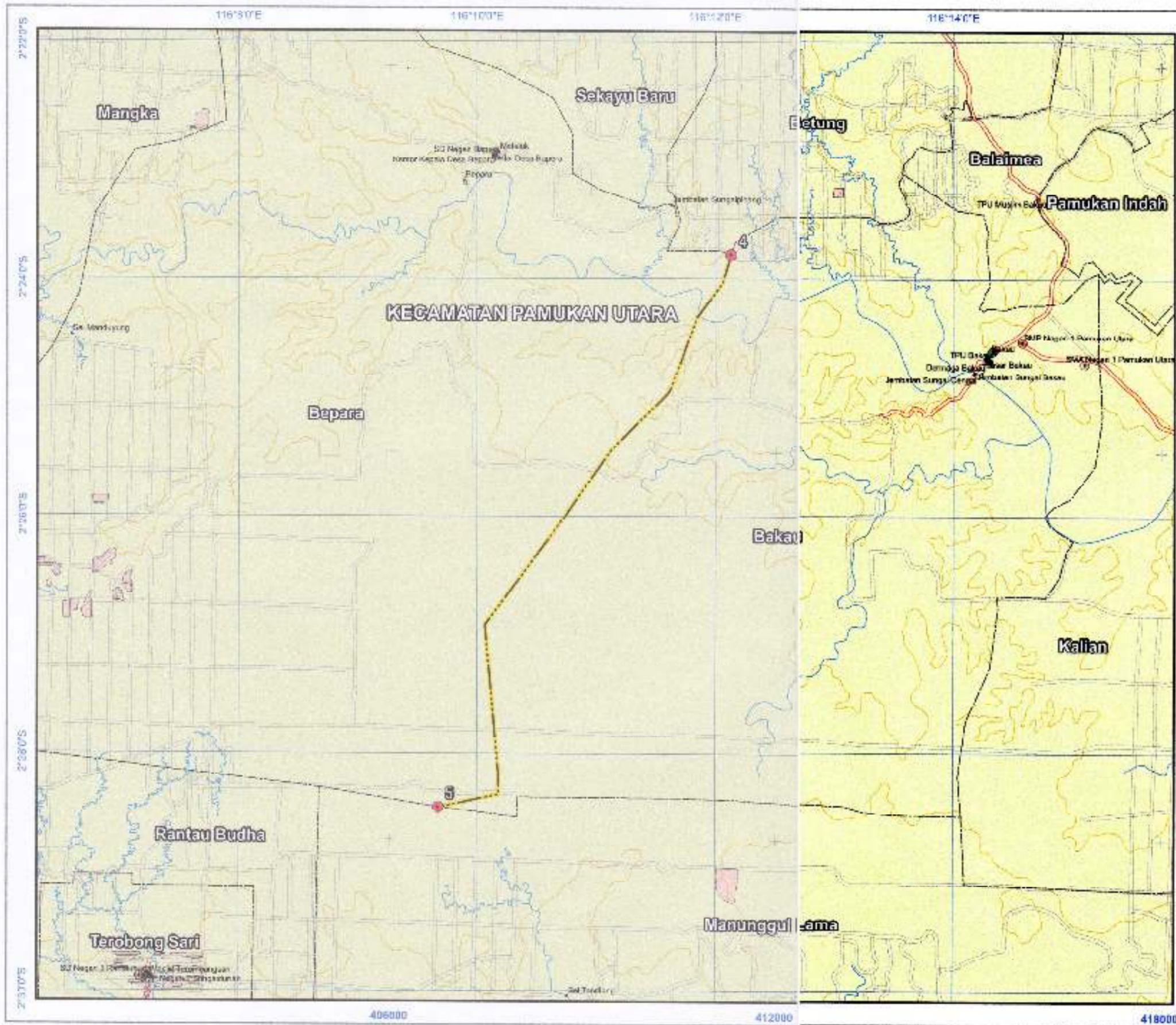
Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



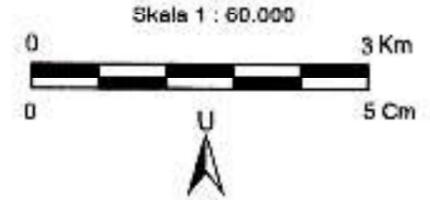
SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2022 NOMOR 163



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
 SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA BAKAU DENGAN DESA BEPARA  
 KECAMATAN PAMUKAN UTARA  
 KABUPATEN KOTABARU  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Datum : ..... Word Geodetic System 1984  
 System Grid : ..... Grid Geografic - Interval 120 detik  
 Proyeksi : ..... Grid UTM - Interval 6000 Meter  
 WGS 1984 UTM Zone 50S

NO	X	Y	X (UTM)	Y (UTM)
4	116° 12' 8.095" BT	2° 23' 47.833" LS	411302.6388	9735074.072
5	116° 9' 40.503" BT	2° 28' 27.919" LS	406751.3128	9726489.267

- Keterangan**
- Toponimi
  - Titik Koordinat Batas Administrasi
  - Bekas Desa Bakau - Desa Bepara
  - Batas Administrasi Wilayah Desa
  - Jalan Kabupaten
  - Jalan Lokal
  - Sungai
  - Sarana ibadah
  - ✚ Puskesmas
  - ⊙ Pemerintahan
  - ⊙ Sarana Pendidikan Kontur
  - Pemukiman

- Sumber Peta :
- Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor: 11 Tahun 2012
  - Peta Rupa Bumi Indonesia
  - Buletin Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru

